

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, penulis berusaha melakukan kajian terhadap karya ilmiah penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, yaitu: Penelitian Ahmad Rokhul, yang berjudul Analisis Peran Pendamping Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Suku Dinas Sosial Jakarta Utara (2010) membahas tentang pelaksanaan program PKH supaya berjalan sebagaimana mestinya. Pendamping PKH diharuskan untuk terjun langsung ke lapangan agar program berjalan seimbang dengan keinginan pendamping dan masyarakat. Pada 2007-2008 terdapat 41 pendamping dan pada 2009 dibutuhkan 47 pendamping pada masing-masing kelurahan. Posisi pendamping ini di mata Ahmad, sangat vital untuk keberhasilan pelaksanaan PKH. Ahmad menambahkan, bahwa fakta membuktikan program intervensi yang menggelontorkan uang tunai kepada masyarakat berpotensi tidak efektif jika tidak dibarengi pengawasan ketat.

Pendamping program PKH bertugas untuk mengawal program di lapangan. Karena itu, petugas tersebut harus mampu menjalankan tugas dan memiliki integritas moral yang tinggi. Terlebih dalam menjalankan tugasnya mereka digaji oleh negara dengan besaran yang relatif memadai. Pendamping yang direkrut dari masyarakat harus menjadi pengaman aliran dana insentif sekaligus seorang kreator dan inovator untuk kemajuan RTSM peserta PKH, Dalam PKH ini, menurut Ahmad, bersifat multi sektoral. Bappeda, Dinas STKT,

Dinas Kesehatan, Disdik, Infokom, hingga Polres terlibat di dalamnya. Bahkan untuk menyukseskan PKH dibangun pola kontrol berupa Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM) disebut UPPKH. UPPKH ini berfungsi mengakomodir segala jenis pengaduan maupun penyelesaiannya yang terkait dengan pelaksanaan PKH.

Jurnal yang ditulis oleh Evi Rahmawati, Bagus Kisworo, pada tahun 2017 yang berjudul "Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Semarang Tengah", dengan pendekatan kualitatif. ini menunjukkan bahwa pendamping telah melakukan perannya dengan baik. Peran tersebut dalam empat kategori, yaitu peran keterampilan fasilitatif, peran dan keterampilan sebagai pendidik, peran dan keterampilan perwakilan masyarakat dan peran keterampilan teknis.

Dalam jurnal lain yang ditulis oleh Devi Septiani, Yunisca Nurmalisa, Abdul Halim pada tahun 2018 yang berjudul "Peran Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Membantu Kemandirian dan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Telukbetung Timur Kota Bandar Lampung". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peran yang signifikan antara pendamping PKH dalam membantu kemandirian dan kesejahteraan keluarga. Artinya, semakin baik peran pendamping program keluarga harapan melaksanakan tugasnya maka semakin baik juga dalam membantu kemandirian dan kesejahteraan keluarga pada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.

Dalam penelitian Aab Abdul Fattah (2014) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati dengan judul skripsi “Peran Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesehatan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Desa Cileunyikulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa peran pendamping program keluarga harapan (PKH) mampu meningkatkan kesehatan rumah tangga sangat miskin (RTSM) di Desa Cileunyi kulon. Seorang pendamping memposisikan dirinya dan mempunyai peran sebagai fasilitator, perantara, mediator, motivator dan sekaligus evaluator. Selain mempunyai peran sebagai agen perubahan yang turut terlibat memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat miskin, pendamping juga harus melaksanakan tugas teknis. Seperti, melakukan sosialisasi dan koordinasi, pemutakhiran data, mengendalikan (*controlling*) dan memantau (*monitoring*), verifikasi data dan melakukan pencatatan dan pelaporan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, dalam penelitian ini penulis ingin meneliti bagaimana peran pendamping PKH dalam pelaksanaan program PKH, menumbuhkan minat masyarakat dan meningkatkan kemandirian masyarakat terhadap bantuan program PKH di Kanagarian Tabek Panjang. Penulis setuju bila dikatakan pendamping merupakan salah satu agen perubahan yang turut membantu memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat miskin/tidak mampu, tetapi hal tersebut tentu memerlukan keikutsertaan dari semua pihak didalamnya. Untuk itu penulis mencoba melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, yaitu bagaimana proses pelaksanaan program, dan bagaimana

peran pendamping dalam pelaksanaan program PKH serta bagaimana peran pendamping dan peserta PKH melewati tantangan yang terkadang muncul dalam pelaksanaan program.

Matriks Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Tahun	Metode	Hasil	Perbedaan
1.	Ahmad Rokhul	Analisis Peran Pendamping Dalam Program Keluarga Harapan Pada Suku Dinas Sosial Jakarta Utara	2010	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan peran pendamping yang sangat vital dalam pelaksanaan program dan membuktikan intervensi berupa penggolontoran uang tunai berpotensi tidak efektif jika tidak diawasi dengan baik	Kriteria penelitian yang diteliti yang dilakukan oleh Ahmad berupa tindakan intervensi berupa penyaluran dana bisa berpotensi tidak efektif jika tidak didampingi dengan baik
2.	Evi Rahmawati, Bagus Kisworo	Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Semarang Tengah	2017	Kualitatif	Hasil penelitian berupa pendamping telah melakukan peran dengan baik, yang terbagi menjadi 4 kategori, yaitu: Peran Fasilitatif, Peran dan Keterampilan Pendidik, peran dan Keterampilan perwakilan Masyarakat, dan peran keterampilan teknis	Adanya sedikit perbedaan dalam aspek penelitian, dalam hal ini aspek yang digunakan oleh peneliti adalah Peran Fasilitatif, Peran Edukatif, Peran dalam pelaksanaan teknis dan peran dalam menghadapi hambatan/tantangan
3.	Devi Septiani, Yunisca Nurmalisa, Abdul Halim	Peran Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Membantu Kemandirian dan Kesejahteraan Keluarga di	2018	Kualitatif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat peran yang signifikan antara pendamping PKH dalam membantu kemandirian dan kesejahteraan keluarga.	Kriteria yang diteliti dalam penelitian adalah menilai hubungan antara peran pendamping PKH dengan kemandirian dan kesejahteraan keluarga

		Kelurahan Kota Karang Kecamatan Telukbetung Timur Kota Bandar Lampung				
4.	Aab Abdul Fattah	Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Meningkatkan Kesehatan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Desa Cileunyiulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung	2014	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa peran pendamping program keluarga harapan (PKH) mampu meningkatkan kesehatan rumah tangga sangat miskin (RTSM) di Desa Cileunyi kulon.	Fokus penelitian dalam melihat peran pendamping PKH dalam peningkatan Kesehatan Keluarga RTSM.

2.2 Kajian Konseptual Tentang Kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Peran

2.2.1 Kajian Tentang Kemiskinan

Dalam arti sederhana kemiskinan dapat dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Menurut SMERU dalam Suharto dkk (2004), kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang, secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam arti sederhana kemiskinan dapat dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Menurut SMERU dalam Suharto dkk (2004), kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang, secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Menurut Tjokrowinito kemiskinan tidak hanya menyangkut persoalan kesejahteraan (*welfare*) semata; tetapi kemiskinan juga menyangkut persoalan kerentanan (*vulnerability*), ketidakberdayaan (*powerless*), tertutupnya akses terhadap pasar, dan kemiskinan terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2.2.1.1 Karakteristik Kemiskinan

Kemiskinan merupakan konsep dan fenomena yang bermatra multidimensional. Suharto (2014: 132) menyatakan bahwa kemiskinan memiliki beberapa ciri sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, dan papan).

2. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal.
5. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam.
6. Keterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

2.2.1.2 Indikator Kemiskinan

Adapun menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014, terdapat 14 indikator yang termasuk kepada kemiskinan, diantaranya adalah:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² /orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu berkualitas rendah.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu
9. Hanya membeli satu pasang pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari

11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/klinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah ; petani dengan luas lahan 500 m² , buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga; tidak sekolah/tidak tamat SD/ tamatan SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp500.000,- seperti sepeda motor kredit/nonkredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jika minimal sembilan variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dianggap miskin.

2.2.2 Kajian Tentang Program Keluarga Harapan

2.2.2.1 Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dilaksanakan sejak tahun 2007 oleh Pemerintah Indonesia. PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster I (Bantuan Sosial Berbasis Keluarga) strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan pemenuhan dasar bagi lansia dan penyandang disabilitas berat. PKH merupakan bantuan yang bersifat tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Dalam jangka pendek, program ini bertujuan mengurangi beban Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan millenium. Lima komponen tujuan *Millenium Development Goals (MDG's)* yang akan terbantu oleh PKH yaitu: pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar,

kesetaraan *gender*, pengurangan angka kematian bayi dan balita, pengurangan kematian ibu melahirkan.

2.2.2.2 Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan PKH adalah mengurangi angka kemiskinan dan memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung dalam peningkatan kesejahteraan. Secara khusus, tujuan PKH adalah:

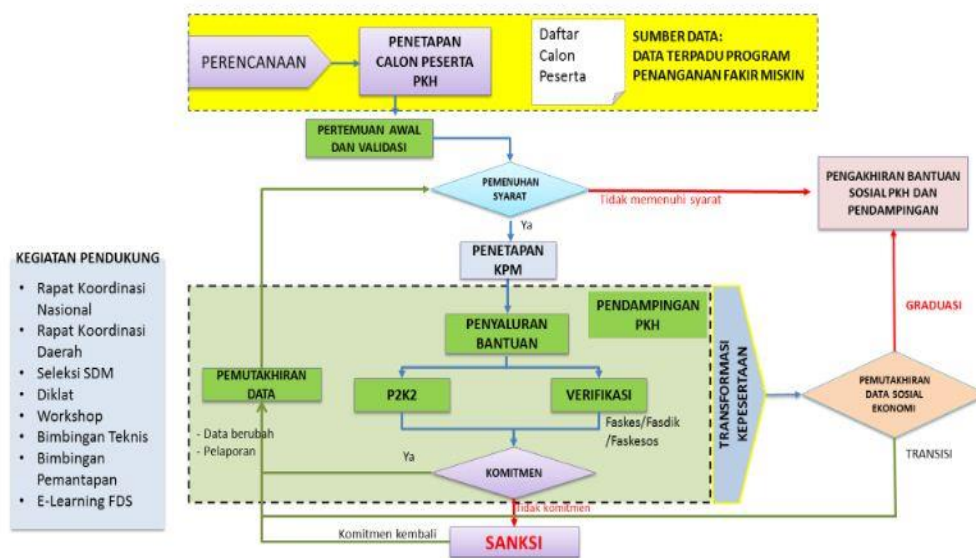
1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan peserta PKH,
2. Meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH,
3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi peserta PKH

2.2.2.3 Proses pelaksanaan program PKH

Proses pelaksanaan PKH yang diolah berdasarkan Panduan Umum. Pelaksanaan PKH adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi PKH, pendamping melakukan sosialisasi ke desa yang memperoleh bantuan PKH. Pada proses ini pendamping melakukan pertemuan awal dengan perangkat desa setempat dan calon peserta PKH untuk menginformasikan tujuan dan ketentuan PKH dan melakukan validasi data untuk menentukan Daftar Tetap Peserta PKH untuk kemudian dikirim ke UPPKH Pusat.
2. Targeting PKH didasarkan atas kriteria rumah tangga miskin dan komponen/tanggung pada saat mendaftar menjadi penerima PKH.
3. Jika data calon peserta telah valid dan memenuhi kriteria kepesertaan maka peserta PKH akan menerima Kartu PKH.

4. Penyaluran bantuan diberikan kepada peserta PKH berdasarkan komponen kepersertaan PKH. Penyaluran bantuan dilaksanakan empat tahap dalam setahun.
5. Verifikasi komitmen peserta PKH pada prinsipnya dilakukan terhadap pendaftaran dan kehadiran anak baik di sekolah untuk komponen pendidikan dan di Puskesmas atau Posyandu untuk komponen kesehatan. Apabila terdapat peserta yang tidak memenuhi komitmen pada akan diberikan sanksi.
6. Pemutakhiran data adalah perubahan sebagian atau seluruh data awal yang tercatat pada *Master Database*. Pemutakhiran data dilakukan oleh pendamping setiap ada perubahan. Perubahan pada pemutakhiran data terdapat pada komponen yang dimiliki masing-masing peserta PKH. Kemudian pemutakhiran data dilakukan oleh operator dengan mengirimkan data para peserta PKH yang telah diverifikasi kepada UPPKH Pusat. Data tersebut dijadikan acuan untuk menentukan besarnya dana PKH tahap selanjutnya.



Gambar 2.1 : Alur proses pelaksanaan PKH

2.2.3 Kajian Tentang Peranan

Peranan merupakan suatu tindakan yang lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Soerjono Soekanto (1987:221). Soedjono Soekanto juga mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran adalah peranan atau tugas yang diberikan kepada individu atau kelompok dalam suatu situasi, organisasi, atau masyarakat. Konsep peran dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut:

1. Peran sosial: Peran sosial merujuk pada harapan, norma, dan nilai yang ada dalam masyarakat yang menentukan tindakan dan perilaku individu dalam peran tersebut. Contohnya, peran sebagai seorang anak, siswa, pekerja, atau warga negara.
2. Pemahaman peran: Pemahaman peran adalah pemahaman individu atau kelompok tentang tugas, tanggung jawab, dan pengharapan yang terkait dengan peran yang diemban. Pemahaman yang jelas tentang peran dapat membantu individu atau kelompok dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas dengan baik.

3. Interaksi peran: Interaksi peran terjadi ketika individu atau kelompok berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya dalam melaksanakan peran mereka. Interaksi ini dapat melibatkan kerjasama, negosiasi, atau konflik yang mempengaruhi bagaimana peran dijalankan dan berdampak pada hasil yang dicapai.
4. Peran dalam organisasi: Dalam konteks organisasi, peran merujuk pada tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk anggota organisasi. Setiap individu memiliki peran yang unik dan saling mendukung untuk mencapai tujuan organisasi.
5. Peran dalam kelompok: Peran dalam kelompok biasanya mencakup peran pemimpin, koordinator, penghubung, atau pelaksana tugas tertentu. Setiap peran ini memiliki kontribusi yang penting dalam mencapai tujuan kelompok.
6. Peran pribadi: Selain peran yang ditetapkan oleh masyarakat atau organisasi, setiap individu juga memiliki peran pribadi yang berkaitan dengan identitas mereka, misalnya sebagai ayah, ibu, saudara, atau teman. Peran pribadi ini membentuk bagaimana individu memberikan kontribusi dan bertindak dalam hubungan personal.
7. Peran fleksibel: Konsep peran juga mengakui bahwa peran tidaklah statis atau tetap. Dalam situasi yang berbeda, individu atau kelompok dapat mengganti peran mereka sesuai dengan kebutuhan. Fleksibilitas ini memungkinkan peran untuk berkembang dan beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan dan keadaan.

Pemahaman tentang konsep peran membantu individu atau kelompok untuk memiliki visi yang lebih jelas tentang perannya, bertindak efektif, dan berkontribusi secara maksimal dalam suatu situasi atau organisasi.

2.2.4 Kajian tentang Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelaksanaan Peran

Kualitas suatu peran sangat menjamin terlaksananya suatu pola di dalam masyarakat. Kualitas tersebut adalah:

1. Komunikasi yang efektif: Penting untuk menjaga komunikasi yang baik antara semua anggota tim dan pemangku kepentingan terkait. Komunikasi yang jelas dan terbuka membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang peran masing-masing dan memungkinkan penyelesaian masalah yang lebih efektif.
2. Pengetahuan dan kompetensi: Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan peran dengan baik sangat penting. Peningkatan terus menerus dalam pengetahuan dan kompetensi dapat dilakukan melalui pelatihan, pembelajaran mandiri, dan pengalaman praktis.
3. Pembagian tanggung jawab yang jelas: Setiap anggota tim harus memiliki pemahaman yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab mereka. Ini membantu dalam memastikan bahwa setiap peran dijalankan dengan efektif dan ada keterkaitan yang jelas antara setiap peran yang ada.
4. Mendukung budaya organisasi: Budaya organisasi yang mendukung peran yang kuat dan kualitas kerja tinggi sangat penting. Ini dapat mencakup penghargaan dan pengakuan terhadap kontribusi individu, tim yang kolaboratif, dan sistem yang memfasilitasi keberhasilan.
5. Pengelolaan waktu yang efisien: Meningkatkan peran dan kualitas kerja juga membutuhkan pengelolaan waktu yang baik. Mengatur prioritas dengan benar, menghindari prokrastinasi, dan mengatur jadwal dengan baik dapat membantu menjaga fokus dan meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan tugas.
6. Pembelajaran dari pengalaman: Melakukan refleksi terhadap pengalaman kerja dan mempelajari pelajaran penting dari situasi yang telah dilalui bisa

sangat bermanfaat. Pembelajaran dari kesalahan dan pengalaman positif dapat membantu dalam meninggalkan pendekatan yang lebih baik dalam pelaksanaan peran.

7. Pengelolaan konflik yang efektif: Konflik yang tidak tertangani dengan baik dapat mengganggu pelaksanaan peran dan kualitas kerja. Memiliki keterampilan dalam mengelola konflik, menyelesaikan perbedaan, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain dapat membantu dalam meningkatkan pelaksanaan peran.

Dalam meningkatkan peran dan kualitas kerja, penting untuk memperhatikan faktor-faktor ini dan melakukan tindakan yang relevan untuk melibatkan semua anggota tim dan pemangku kepentingan terkait.

2.2.5 Kajian tentang Cara Meningkatkan Peran

Peran seseorang atau sebuah kelompok dalam suatu kegiatan atau organisasi dapat ditingkatkan melalui beberapa cara berikut:

1. Pemahaman yang mendalam tentang tugas dan tanggung jawab: Setiap individu atau kelompok harus memiliki pemahaman yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk memahami peran mereka secara keseluruhan dan bekerja dengan lebih efektif.
2. Pengembangan keterampilan dan pengetahuan: Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan peran dapat membantu meningkatkan kinerja dan kontribusi individu atau kelompok. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pendidikan tambahan, atau pengalaman kerja.

3. Peningkatan komunikasi: Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk meningkatkan peran seseorang atau kelompok. Mengadakan pertemuan rutin, menggunakan komunikasi terbuka dan jelas, serta mendengarkan dengan aktif dapat membantu mengurangi ketidakjelasan dan memperbaiki komunikasi antara individu atau kelompok.
4. Kolaborasi dan kerjasama: Meningkatkan peran juga melibatkan kemampuan untuk bekerja sama dengan individu atau kelompok lainnya. Kolaborasi yang baik dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas secara keseluruhan.
5. Motivasi: Motivasi yang tinggi merupakan faktor penting dalam meningkatkan peran seseorang atau kelompok. Memberikan penghargaan dan pengakuan yang tepat, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memberdayakan, dapat membantu meningkatkan motivasi individu atau kelompok.
6. Evaluasi dan umpan balik: Melakukan evaluasi rutin dan memberikan umpan balik konstruktif kepada individu atau kelompok adalah cara untuk memperbaiki kinerja mereka. Hal ini juga dapat membantu mereka memahami area di mana mereka perlu berkembang lebih lanjut.
7. Fleksibilitas: Menjadi fleksibel dan adaptif terhadap perubahan adalah kualitas yang sangat penting untuk meningkatkan peran seseorang atau kelompok. Dalam dunia yang terus berubah, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dan mengambil inisiatif dalam situasi yang tidak terduga dapat membuat seseorang atau kelompok menjadi lebih efektif.

Akhirnya, meningkatkan peran seseorang atau kelompok bukanlah hal yang instan, melainkan melibatkan kerja keras, kesabaran, dan dedikasi dalam mengembangkan diri dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

2.2.6 Kajian Tentang Pendamping PKH

Dilihat dari susunan katanya bahwa istilah Pendamping terdiri dari 2 (dua) suku kata, yaitu: Pen (pe) dan damping. Suku kata Pen (Pe) mengartikan Individu, orang yang sedang melakukan pekerjaan atau aktivitas tertentu. Suku kata Damping mempunyai arti Sisi atau Samping terdekat, Mitra, Setara, Teman. Maka dapat diterangkan bahwa makna Pendamping adalah Individu atau seseorang yang melakukan aktivitas menemani secara dekat dan mempunyai kedudukan setara dengan yang ditemani.

Pendamping program PKH bertugas untuk mengawal program di lapangan. Karena itu, petugas tersebut harus kapabel dan memiliki integritas moral yang tinggi. Terlebih dalam menjalankan tugasnya mereka digaji oleh negara dengan besaran yang relatif memadai. Pendamping yang direkrut dari masyarakat harus menjadi pengaman aliran dana insentif sekaligus seorang kreator dan inovator untuk kemajuan RTSM peserta PKH. Dalam PKH ini, menurut Panji, bersifat multi sektoral. Bappeda, Dinas STKT, Dinas Kesehatan, Disdik, Infokom, hingga Polres terlibat di dalamnya. Bahkan untuk menyukseskan PKH dibangun pola kontrol berupa Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM) disebut UPPKH. UPPKH ini berfungsi mengakomodir segala jenis pengaduan maupun penyelesaiannya yang terkait dengan pelaksanaan PKH.

Pendamping merupakan aktor penting dalam menyukseskan PKH. Pendamping PKH adalah pelaksana PKH di tingkat kecamatan. Pendamping diperlukan karena sebagian besar orang miskin tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki suara dan kemampuan untuk memperjuangkan hak mereka yang sesungguhnya. Orang miskin tersebut membutuhkan pejuang yang menyuarakan mereka, yang membantu mereka mendapatkan hak. Pada sisi pelaksana PKH, UPPKH Kabupaten/Kota tidak memiliki kemampuan melakukan tugasnya di seluruh tingkat kecamatan dalam waktu bersamaan. Petugas yang dimiliki sangat terbatas

sehingga amatlah sulit mendeteksi segala macam permasalahan dan melakukan tindak lanjut dalam waktu cepat. Jadi pendamping sangat dibutuhkan.

Lokasi kantor pendamping sendiri terletak di UPPKH Kecamatan yang berada di kantor camat, atau di kantor yang dekat dengan PT Pos Indonesia dan atau kantor kecamatan di wilayah yang memiliki peserta PKH. Di sini pendamping melakukan berbagai tugas utama lainnya, seperti: membuat laporan, memperbaharui dan menyimpan formulir serta kegiatan rutin administrasi lainnya. Secara kelembagaan, Pendamping melaporkan seluruh kegiatan dan permasalahannya ke UPPKH Kabupaten/Kota.

2.2.5 Kajian Tentang Peran dan Keterampilan Pendamping PKH

Menurut Ife (2008; 558-613) ada empat peran dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang Pekerja Sosial seperti pendamping PKH yaitu:

1. Peran dan keterampilan fasilitatif (*facilitative roles and skills*) meliputi tujuh peran khusus, yaitu animasi sosial, mediasi dan negosiasi, pemberi dukungan, membentuk konsensus, fasilitasi kelompok, pemanfaatan sumber daya dan keterampilan serta mengorganisasi.

Peran fasilitatif ialah peran pendamping sosial terhadap KPM dalam memberikan dukungan, semangat, melatih kemampuan individu ataupun kelompok dalam menyelesaikan masalah serta membantu meningkatkan kepercayaan diri untuk menuju kearah kehidupan yang lebih baik.

2. Peran dan keterampilan edukasional (*educational roles and skills*) meliputi empat peran yaitu membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, mengonfrontasikan dan pelatihan.

Pendamping sosial berperan aktif sebagai agen yang member masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan masyarakat yang didampinginya melalui PKH.

3. Peran dan keterampilan teknis (*technical roles and skills*) peran teknis tersebut mencakup keterampilan untuk melakukan riset, menggunakan komputer, melakukan presentasi tertulis maupun verbal serta kemampuan untuk mengontrol dan mengelola keuangan. Peran ini sangat penting bagi pendamping sosial dalam mengorganisasikan kelompok Keluarga Penerima Manfaat.